

Peran Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan

Rizki Ramadhani

Universitas Putra Bangsa-ramadhani362@gmail.com

Abstrak- *This study examines in more depth the role of regional spending as an intervening variable in its influence on Local Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) in reducing poverty levels. The study uses data samples from the Special Region of Yogyakarta from 2018 to 2023 with the analysis tool EViews 13. To ensure the role of regional spending as a mediating variable, the Sobel test was used. The results of the study found that regional spending is able to mediate the relationship between Local Revenue and Revenue Sharing Funds in reducing poverty levels. However, no mediating role of regional spending was found in the effect of Special Allocation Funds on poverty levels. Regional spending independently has a significant impact on poverty reduction.*

Keywords: *Regional spending; Local Revenue (PAD); Special Allocation Funds (DAK); Revenue Sharing Funds (DBH); Poverty reduction*

1. PENDAHULUAN

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hal krusial yang membutuhkan berbagai macam kebijakan strategis dan faktor pendukung. Peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial menjadi indikator standar kelayakan hidup yang diharapkan mampu meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Fitriyanti and Handayani 2020). Kesejahteraan merupakan perwujudan salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinannya.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Berbagai upaya dan usaha telah dan terus dilakukan namun kemiskinan masih belum dapat dituntaskan. Hal ini tak lepas dari masih relatif besarnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan adalah salah satu masalah pokok negara harus dituntaskan karena dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah (Paulus, Koleangan, and Engka 2019). Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi lebih besar pula (Panggabean, Hariani, and B 2022). Mengacu pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori daerah termiskin di Indonesia. Pergerakan persentase angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih

tergolong fluktuatif sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan maupun penurunan persentase ini.

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
(Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
D.I. Yogyakarta	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04
Kulonprogo	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	12,92	13,5	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	15,86	15,6
Sleman	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Implementasi desentralisasi fiskal adalah salah satu bukti pelaksanaan otonomi daerah di pemerintahan. Desentralisasi mengacu pada pengalihan kompetensi, kemampuan, dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah yang lebih baik, termasuk pengalihan fungsi dan sumber daya (Kharisma 2013). Desentralisasi fiskal merupakan reformasi kebijakan yang penting; sekitar 95% negara berkembang di dunia telah mengadopsi kebijakan ini demi stabilitas di berbagai sektor (Anggraeni, Khusaini, and Prasetyia 2023). Adanya pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam desentralisasi fiskal akan memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Salah satu sisi negatif yang muncul adalah adanya kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antar daerah yang ditandai dengan tingkat kemiskinan daerah.

Keterbatasan kemampuan fiskal yang muncul akibat otonomi daerah membuat pemerintah daerah masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar. Bantuan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut sebagai Dana Perimbangan dan besarnya akan tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah. APBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Belanja daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Belanja Daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Penggunaan belanja daerah yang ditujukan kepada program-program yang salah satunya adalah program sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan. Dalam struktur APBD yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Risdiyanto, Mollet, and Hutajulu (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa belanja daerah memiliki pola berlawanan dengan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua. Belanja daerah yang meningkat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan di Provinsi Papua. Hasil lain ditemukan oleh Fitriyanti dan Handayani (2020) menyatakan secara independen belanja daerah tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian lain menemukan adanya peranan penting belanja daerah sebagai mediasi PAD, DAU dan DBH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Riau (Isramiwarti, Rasuli, dan Taufik 2017). Adanya hasil penelitian yang masih bervariasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh PAD dan dana perimbangan yakni DAK dan DBH terhadap kemiskinan dengan belanja daerah sebagai variabel intervening.

2.METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan realisasi APBD yang dapat diperoleh di www.dpj.kemenkeu.go.id dan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *time series*. Adapun penelitian ini menggunakan data tahun 2018-2023. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berada di dalam kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota, yakni Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode non purposive sampling.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian untuk pemilihan model terbaik untuk analisis data. Hal ini dilakukan dengan cara menguji data dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Analisis pertama menggunakan Uji Chow dengan nilai probabilitas $0,00 < 0,05$ sehingga model terbaik adalah FEM (*Fixed Effect Model*). Selanjutnya dilakukan Uji Hausman. Uji Hausman hanya dilakukan apabila Uji Chow menunjukkan hasil model terpilih adalah FEM. Dari hasil Uji Hausman menunjukkan nilai $0,00 < 0,05$ sehingga model terpilih untuk uji hipotesis adalah FEM.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	506.061370	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	137.362520	4	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	204.245479	4	0.0000

Sumber: Data diolah (2024)

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan model terpilih yaitu FEM. Data kemudian di uji dengan menggunakan uji sobel. Uji sobel adalah pengujian yang memastikan pengaruh variable independent terhadap variable dependen melalui variable mediasi atau intervening. Dengan adanya uji sobel, hasil analisis akan benar-benar memastikan pengaruh tidak langsung dalam variable yang sedang diuji di dalam model penelitian. Dari hasil pengujian model hipotesis, diketahui bahwa secara langsung variable X1 yakni PAD berpengaruh secara negative terhadap kemiskinan. Variable X2 yaitu DAK berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan dengan signifikansi 10%. Variable DBH berpengaruh secara negative terhadap kemiskinan dan variable intervening yaitu belanja daerah berpengaruh negative terhadap kemiskinan daerah.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.960572	2.874239	3.117546	0.0052
X1	-2.90E-05	9.78E-05	-0.296943	0.0364
X2	7.23E-06	2.64E-05	0.273715	0.0870
X3	-0.000567	0.000217	-2.614279	0.0162
Z	-0.000132	6.38E-05	-2.061019	0.0419

Sumber: Data diolah (2024)

Pembahasan

Belanja Daerah Mampu Memediasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikansi sebesar 0,0364 dan t hitung dari uji sobel sebesar 0,047 lebih kecil dari alpha (0,05) dengan nilai koefisien sebesar -0,2969. Artinya, hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini diterima. PAD yang semakin tinggi akan memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja daerah. Apabila dalam penggunaan dana PAD untuk belanja daerah dilakukan secara efisien dan efektif maka secara perlahan tingkat kemiskinan daerah akan menurun.

Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah. Hasil penelitian sejalan dengan Fitriyanti dan Handayani (2020); Panggabean, Hariani, and B (2022).

Belanja Daerah Mampu Memediasi Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dana Perimbangan dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan data Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan dilakukan oleh daerah otonom. Khususnya, tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sehingga, semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka bantuan pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan bantuan dana yang ditujukan untuk mengurangi adanya ketimpangan fiskal yang terjadi akibat adanya otonomi daerah. Hal ini diharapkan nantinya kinerja pemerintah daerah dapat selaras dengan satu sama lain dalam memajukan kesejahteraan daerahnya masing-masing.

Dari hasil analisis, DAK memiliki signifikansi 0,087 > 0,05 dan nilai t hitung uji sobel adalah 0,066 (lebih besar dari alpha). Hipotesis kedua ditolak. Belanja daerah tidak mampu memediasi pengaruh DAK terhadap kesejahteraan daerah yang ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Hal diduga karena adanya realisasi penggunaan DAK yang belum efisien. Dalam realisasi penggunaan dana DAK akan bergantung pada kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu kebutuhan fisik maupun non fisik. Penggunaan DAK untuk mendanai kebutuhan fisik dan non fisik daerah nampaknya belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh

karenanya perlu diteliti secara lebih mendalam terkait penggunaan DAK ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (Fitriyanti and Handayani 2020).

Hipotesis ketiga memiliki signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ dan nilai t hitung uji sobel sebesar $0,038$ yang artinya hipotesis ketiga diterima. Belanja daerah mampu memediasi pengaruh DBH terhadap penurunan tingkat kemiskinan daerah. DBH merupakan salah satu pendanaan yang tujuannya adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Dengan adanya pengalokasian yang tepat dan optimal maka pelayanan public juga akan meningkat dan secara jangka panjang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan (Isramiwarti, Rasuli, dan Taufik 2017; Nany et al. 2022).

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ dengan nilai t adalah sebesar $-2,061$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variable belanja daerah memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi belanja daerah maka akan semakin banyak pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat sehingga secara jangka panjang akan menaikkan tingkat perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan. Peningkatan belanja daerah untuk investasi aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi pengeluaran investasi suatu daerah, semakin tinggi pula produktivitas perekonomiannya. Adanya belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan public menjadi salah satu factor yang berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Risdiyanto, Mollet, dan Hutajulu (2023) di Papua.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Belanja daerah mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan public sehingga taraf perekonomian naik dan tingkat kemiskinan menurun.
2. Belanja daerah belum mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini masih perlu diteliti secara lebih mendalam terkait apakah realisasi penggunaan DAK sudah efisien dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa belanja daerah mampu memediasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan daerah. Penggunaan DBH yang optimal dapat meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan public sehingga kesejahteraan daerah meningkat dan kemiskinan berkurang.
4. Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah secara signifikan negative mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Belanja daerah mampu meningkatkan pelayanan social yang diberikan kepada masyarakat

sehingga secara tidak langsung mendorong tingkat perekonomian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Rima Melati, Mohamad Khusaini, and Ferry Prasetyia. 2023. "Fiscal Decentralization and Its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia." *Bulletin of Islamic Economics* 1(2): 35–48.
- Badan Pusat Statistik. 2024. "No Title." <https://www.bps.go.id/>.
- Fitriyanti, Nur Ika, and Herniwati Retno Handayani. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016)." *Jurnal Ekonomi Diponegoro* 9(2): 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isramiwarti, Riry, M. Rasuli, and Taufeni Taufik. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau Tahun 2011 S/D 2015." *Pekbis Jurnal, Vol., No.3, November 2017* 9(3): 195–213.
- Kharisma, Bayu. 2013. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 14(2): 101–19.
- Nany, M, D B Pratama, M Prasetyaningrum, and A U Kusumaningsih. 2022. "Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 22(3): 247–61. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938>.
- Panggabean, Helena Louise, Danarti Hariani, and A. Yanuar B. 2022. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019." *Owner* 6(2): 2200–2208.
- Paulus, Dewi Irma Septiyani, Rosalina A.M. Koleangan, and Daisy S.M. Engka. 2019. "Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(2): 1–18.
- Risdiyanto, Endro, Julius Ary Mollet, and Halomoan Hutajulu. 2023. "Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua." *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Review* 11(2): 1813–22.